

**Analisis Regresi Linear Berganda untuk Perhitungan Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat**

**Amanda Ardita Panjaitan<sup>1</sup>; Nelsi Wisna<sup>2</sup>; Tora Fahrudin<sup>3</sup>**

Program studi Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Ilmu Terapan, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

amandardita@student.telkomuniversity.ac.id<sup>1</sup>; nelsie@telkomuniversity.ac.id<sup>2</sup>; torafahrudin@telkomuniversity.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*Regional Original Revenue is a receipt of funds obtained from the management of the original potential of the region in accordance with the laws and regulations. Motor Vehicle Tax is one of the main contributors to Local Owned Revenue (PAD) which is used to finance regional development and expenditures. This study aims to evaluate the impact of Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Title Transfer Fee, and Regional Retribution on Regional Original Revenue in West Java Province in the period 2018-2023. The research method used is quantitative using secondary data collected through documentation. Hypothesis analysis was conducted using multiple linear regression with the help of SPSS software, including the F test, t test, and simultaneous and partial determination analysis. The research findings show that Motor Vehicle Tax (PKB), Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB), and Regional Retribution significantly affect West Java's Original Revenue.*

**Keywords:** Motor Vehicle Tax; Motor Vehicle Title Transfer Fee; Local Retribution; Regional Original Income.

**ABSTRAK**

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu penerimaan dana yang diperoleh dari pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu kontributor utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan belanja daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat pada periode 2018-2023. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang terkumpul melalui dokumentasi. Analisis hipotesis dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS, termasuk uji F, uji t, serta analisis determinasi simultan dan parsial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Retribusi Daerah secara signifikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat.

**Kata kunci:** Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Retribusi Daerah; Pendapatan Asli Daerah

## **PENDAHULUAN**

Sumber pendapatan yang diterima oleh negara berasal dari beragam sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber utama dari sektor internal adalah pajak (Hartini & Sopian, 2018). Pajak menyumbang sekitar 80% dari total pendapatan negara (Nuraini, 2023) dan merupakan sumber utama bagi pembangunan negara. Kegiatan pemerintah dapat terhambat jika banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya (Taufik, 2016). Hampir semua daerah di Indonesia mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan, yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena tidak hanya sebagai sumber penerimaan tetapi juga sebagai alat pengaturan (Tommy Pratama, 2022). Kesadaran pajak di kalangan masyarakat sangat penting, karena pajak adalah fondasi dari hubungan saling ketergantungan antara negara dan masyarakat (Ferdian, 2022).

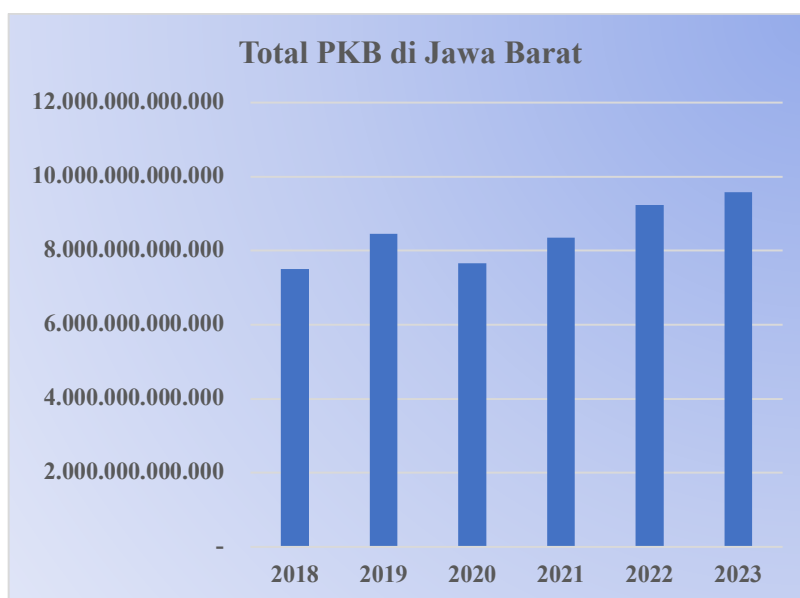
Pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh melalui Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak Daerah adalah sumber utama penerimaan daerah yang wajib dibayar oleh individu atau badan yang diatur secara hukum, tanpa mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan daerah sebesar-besarnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009. Pajak Daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Rompis dkk., 2015).

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Pemerintahan Daerah melaksanakan fungsi dan kewenangan dalam bentuk regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendapatan daerah. Salah satu bentuk kerja sama dilakukan dengan SAMSAT dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, mengingat banyaknya penduduk yang menggunakan kendaraan bermotor di daerah (Nadeak & Sunasti, 2019). Berdasarkan pertimbangan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meningkatkan upaya untuk memperoleh pendapatan daerah melalui dinas perpajakan, termasuk Dinas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kewajiban masyarakat untuk patuh terhadap undang-undang perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik disebut sebagai kepatuhan pajak. Kepatuhan ini sangat penting karena dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari pajak kendaraan bermotor. Kenaikan produksi kendaraan bermotor dalam negeri secara berkelanjutan langsung berdampak pada jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (Ayu dkk., 2022). Pada semester I tahun 2023, Penerimaan Pajak Provinsi Jawa Barat mencapai Rp 10,5 triliun, yang memenuhi 48% dari target pajak tahun ini sebesar Rp 21,9 triliun. Sebagian besar penerimaan berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) yang mencapai Rp 4,2

triliun. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Jabar berkontribusi signifikan terhadap capaian ini, meskipun Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) tetap berupaya untuk terus memberikan edukasi tentang pentingnya membayar pajak (Taufik, 2023).

Bapenda Jabar berhasil melampaui target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 32,7 triliun, di mana PKB merupakan salah satu dari lima pajak yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan memberikan kontribusi sebesar 40% terhadap PAD (Taufik, 2022b). Selain itu, dalam mendukung program pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Bapenda Jabar memberikan insentif berupa pembebasan denda, pembebasan BBNKB II, bebas tunggakan PKB tahun ke-5, diskon PKB, dan diskon BBNKB (Taufik, 2022a).



**Gambar 1. Penerimaan PKB**

Sumber: Bapenda Jawa Barat yang diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan peningkatan yang signifikan. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok pada tahun 2020 dimana penerimaan PKB tidak mencapai level tahun sebelumnya.

Meskipun penerimaan PKB mengalami kenaikan, masih terdapat masalah yang perlu diperhatikan, yaitu tingginya jumlah masyarakat yang menunggak membayar pajak. Pada tahun 2020, misalnya, dari sekitar 17 juta kendaraan bermotor di Jawa Barat, hanya 11 juta kendaraan yang telah membayar pajak (DDTCNews, 2020). Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai program untuk meningkatkan penerimaan PKB, salah satunya adalah program pemutihan pajak. Program ini berlangsung dari 1 Juli 2022 hingga 31 Agustus 2022

dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak kendaraan (Ruliyani, 2022).

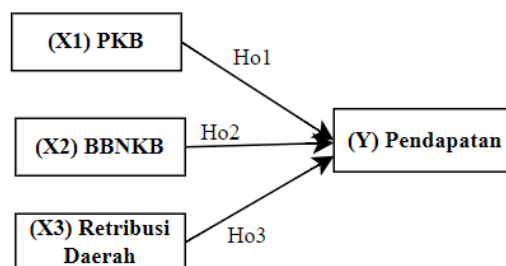
Regresi digunakan untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Pajak pada kendaraan. Regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel independen dan digunakan untuk mengevaluasi pengaruh dan arah variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Analisis ini membantu dalam menentukan hubungan sebab-akibat di antara faktor-faktor tersebut. Persamaan regresi, yang dapat berbentuk linier atau non linier, diterapkan untuk menyatakan hubungan fungsional di antara variabel-variabel tersebut. Tujuan utama dari regresi linear berganda adalah mengukur pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen serta memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen yang diketahui (Sungkawa, 2015).

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
2. Bagaimana pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah?

Tujuan penelitian ini dirancang untuk mengungkap pokok-pokok berikut:

1. Untuk memahami pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk memahami pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**

## TINJAUAN LITERATUR

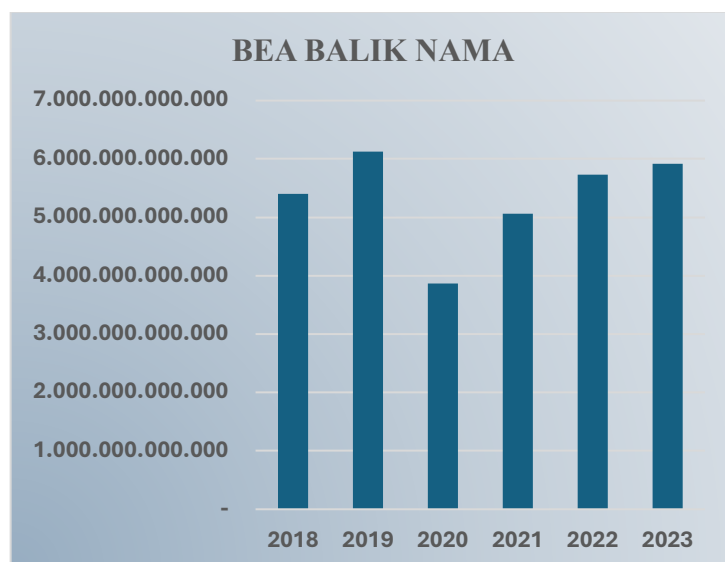
### Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Salah satu sumber penerimaan daerah provinsi yang berasal dari pajak adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mencakup semua kendaraan beroda dan gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, yang dioperasikan dengan menggunakan motor atau peralatan lain yang mengubah energi menjadi tenaga gerak, termasuk alat-alat berat dan besar (Rompis dkk., 2015).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berperan sebagai salah satu sumber penerimaan pajak daerah di sebuah provinsi, yang dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk pembangunan serta pengembangan perekonomian daerah tersebut. Objek pajak PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan subjeknya adalah individu atau badan hukum yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor (Pandangan & Hutapea, 2024).

### Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Penerimaan pajak daerah lainnya berasal dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dengan jumlah penduduk yang besar di Jawa Barat, transaksi perubahan kepemilikan kendaraan bermotor juga dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, BBNKB diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pandangan & Hutapea, 2024).



**Gambar 3. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

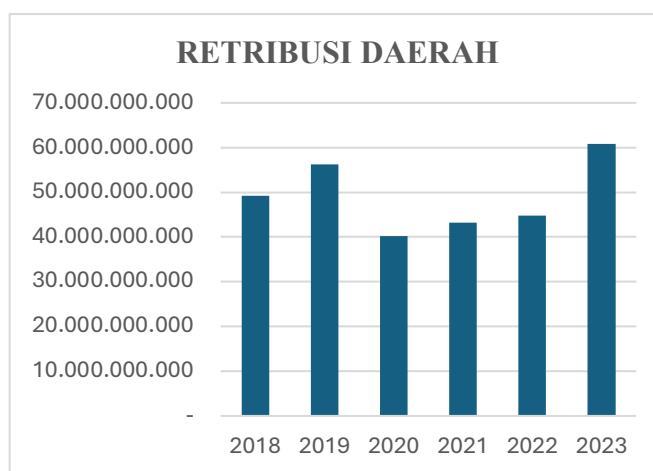
Sumber: PPID Jawa Barat yang diolah oleh penulis, 2024

Selanjutnya dapat kita lihat adanya peningkatan penerimaan BBNKB di Provinsi Jawa Barat pada periode 2018-2023. Perubahan penerimaan yang

bervariasi, terdapat kenaikan dan penurunan tingkat penerimaan BBNKB pada Gambar 2. Untuk penerimaan BBNKB menunjukkan kecenderungan terjadi penurunan. Tentunya hal ini akan mempengaruhi target penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Barat.

### Retribusi Daerah

Kemampuan suatu daerah dalam mengelola retribusi daerah dan pajak daerah adalah indikator penting dari kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Hal ini karena pendapatan yang diperoleh dari retribusi daerah dan pajak daerah dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang esensial untuk mendukung kemandirian daerah dan tanggung jawab pemerintah daerah secara konseptual (Sudarmana & Sudiarta, 2020). Pajak daerah merupakan kontributor utama terhadap pendapatan asli daerah, sementara retribusi daerah menjadi penyumbang kedua terbesar setelah pajak. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang harus diberikan kepada daerah, sedangkan retribusi daerah dikenakan sebagai balas jasa atas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan retribusi daerah dapat diperluas dan dioptimalkan sebagai sumber pendapatan yang potensial bagi daerah (Asteria, 2015)



**Gambar 4. Penerimaan Retribusi Daerah**

Sumber: PPID Jawa Barat yang diolah oleh penulis, 2024

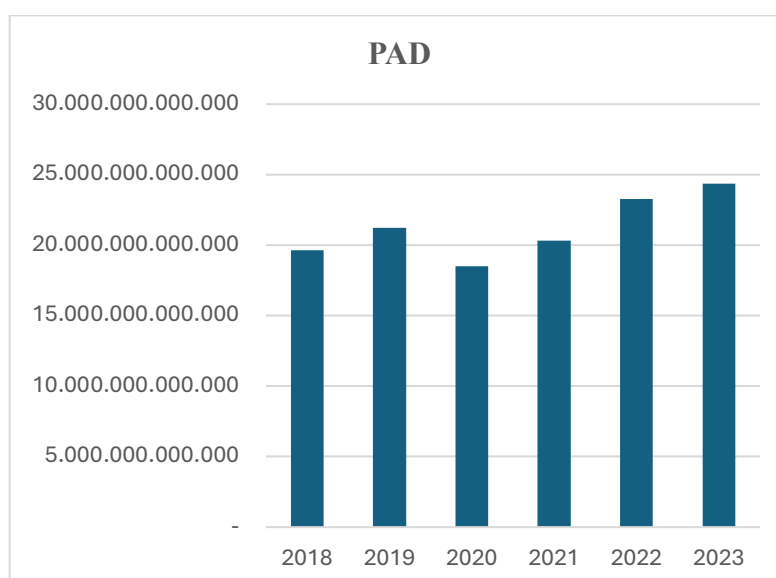
Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Retribusi Daerah merupakan komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah, serta terdapat perbedaan hasil-hasil penelitian tentang Pendapatan Asli Daerah.

### Pendapatan Asli Daerah

Menurut Anggoro (2017:18), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah melalui pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan (Anggoro, 2017). Pendapat Sugianto (2008:64) menyatakan bahwa PAD mencerminkan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu

pemerintah daerah. Konsep ini menunjukkan bahwa PAD dapat digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi suatu kabupaten atau kota, yang sangat bergantung pada kapasitas perpajakan yang dimiliki kabupaten atau kota tersebut (Nooraini & Yahya, 2018).

Sumber utama pendapatan asli daerah berasal dari pajak-pajak asli daerah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan, pajak perhotelan, restoran, reklame, biaya retribusi, dan keuntungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Nooraini & Yahya, 2018). Besaran pendapatan pajak yang diterima PAD mencerminkan aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Selain itu, pembangunan ekonomi daerah sering kali menghadapi tantangan dalam hal pendanaan, dan banyak daerah masih mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya (Nooraini & Yahya, 2018).



**Gambar 5. Penerimaan PAD**

Sumber: PPID Jawa Barat yang diolah oleh penulis, 2024

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu (Sugiyono, 2023). Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif verifikatif dengan metode kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dengan menggunakan data sekunder dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Populasi penelitian ini terdiri dari laporan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Retribusi Daerah dari tahun 2018 hingga 2023.

Fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kontribusi penerimaan PKB, BBNKB, dan Retribusi Daerah sebagai variabel independen terhadap

Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling*, khususnya metode *purposive sampling*. Teknik ini dipilih karena sesuai untuk penelitian kuantitatif yang tidak melakukan generalisasi. Kriteria pemilihan sampel didasarkan pada laporan realisasi anggaran dari tahun 2018 hingga 2023, dengan mempertimbangkan fenomena yang terjadi pada periode tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (X1), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2), dan Retribusi Daerah (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berikut ini adalah hasil penelitian mengenai dampak pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Periode 2018-2023). Selain itu, data ini telah dianalisis menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil analisis ditunjukkan pada tabel berikut ini :

#### Uji Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 1. Uji Analisis Regresi Linier berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.952	2.791		-.341	.766
	Pajak Kendaraan Bermotor	2.184	.418	.813	5.229	.035
	Bea Balik Nama	.486	.567	.179	.858	.481
	Retribusi Daerah	.022	.054	.080	.411	.721

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Dari hasil *output* di atas, model persamaan regresi linier berganda dapat diungkapkan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

$$Y = -0,952 + 2,184 X_1 + 0,486 X_2 + 0,022X_3 + e$$

Dari hasil persamaan regresi di atas, setiap variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta memiliki nilai -0,952, yang menunjukkan bahwa jika variabel Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) memiliki nilai 0, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan menurun sebesar -0,952.

2. Koefisien untuk Pajak Kendaraan Bermotor (X1) adalah 2,184, yang berarti bahwa peningkatan dalam Pajak Kendaraan Bermotor diprediksi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2,184 unit.
3. Koefisien untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) adalah 0,022, yang menunjukkan bahwa peningkatan dalam Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diprediksi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,022 unit.

Jika nilai signifikansi (Sig.) dari variabel-variabel ini lebih besar dari alpha (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (Ho) diterima. *Output* ini memberikan informasi tentang signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi.

### Uji F

**Tabel 2. Uji F**

**ANOVA<sup>d</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	23.933	3	7.978	21.836	.044 <sup>a</sup>
	Residual	.731	2	.365		
	Total	24.664	5			

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 2, nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,44, yang menunjukkan bahwa  $0,000 < 0,05$ . Oleh karena itu, hipotesis nol (Ho) ditolak, yang mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Retribusi Daerah secara signifikan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, sehingga model ini layak dan relevan untuk digunakan.

### Uji t

**Tabel 3. Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.952	2.791		-.341	.766
	Pajak Kendaraan Bermotor	2.184	.418	.813	5.229	.035
	Bea Balik Nama	.486	.567	.179	.858	.481
	Retribusi Daerah	.022	.054	.080	.411	.721

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Dari hasil tabel 3 di atas, penentuan hipotesis dengan uji parsial sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang diolah, Pajak Kendaraan Bermotor diyakini mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Dari Tabel 3, nilai signifikansi untuk Pajak Kendaraan Bermotor adalah 0,000, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Koefisien positif yang diperoleh sebesar 2,184 menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti dapat diterima. Ini mengindikasikan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga diyakini mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Tabel 3, nilai signifikansi untuk variabel ini adalah 0,000, yang menunjukkan bahwa pengaruhnya signifikan pada tingkat  $\alpha = 0,05$ . Koefisien positif sebesar 0,486 menegaskan bahwa hipotesis mengenai pengaruh positif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dapat diterima.
3. Retribusi Daerah juga diperkirakan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Tabel 3 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 untuk Retribusi Daerah, lebih kecil dari tingkat  $\alpha = 0,05$ . Koefisien positif 0,022 menegaskan bahwa hipotesis tentang pengaruh positif Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat dapat diterima.

### Koefisien Determinasi

**Tabel 4. Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>d</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.985 <sup>a</sup>	.970	.926	.6044401024
2	.984 <sup>b</sup>	.968	.946	.5138941763
3	.966 <sup>c</sup>	.933	.916	.6421508682

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

b. Predictors: (Constant), Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

c. Predictors: (Constant), Pajak Kendaraan Bermotor

d. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2024

Berdasarkan perhitungan tabel 5 di atas, nilai korelasi antara variabel Y dengan seluruh variabel independen secara umum (R) sebesar 0,985, sedangkan koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.970 artinya 97% variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 (Pajak Kendaraan Bermotor), X2 (Bea Balik Nama) dan X3 (Retribusi Daerah). Sisa 3% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

**Hasil Pengujian Hipotesis**

**Tabel 5. Koefisien Determinasi Parsial**  
**Correlations**

		Pendapatan Asli Daerah	Pajak Kendaraan Bermotor	Bea Balik Nama	Retribusi Daerah
Pearson Correlation	Pendapatan Asli Daerah	1.000	.966	.743	.649
	Pajak Kendaraan Bermotor	.966	1.000	.617	.529
	Bea Balik Nama	.743	.617	1.000	.775
	Retribusi Daerah	.649	.529	.775	1.000
Sig. (1-tailed)	Pendapatan Asli Daerah	.	.001	.045	.082
	Pajak Kendaraan Bermotor	.001	.	.096	.140
	Bea Balik Nama	.045	.096	.	.035
	Retribusi Daerah	.082	.140	.035	.
N	Pendapatan Asli Daerah	6	6	6	6
	Pajak Kendaraan Bermotor	6	6	6	6
	Bea Balik Nama	6	6	6	6
	Retribusi Daerah	6	6	6	6

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 2024

Selanjutnya untuk membuktikan apakah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Retribusi Daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara langsung, maka dilakukan pengujian hipotesis. Data yang digunakan pada regresi adalah data kuantitatif sehingga korelasinya menggunakan korelasi Pearson. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 5.

Prosedur pengujian hipotesis untuk korelasi variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) dan X1 (Pajak Kendaraan Bermotor) adalah

1. Hipotesis :  
 H0 = Tidak terdapat korelasi antara Y dan X1  
 H1 = Terdapat korelasi antara Y dan X1
2. Statistik uji : Pearson (karena menguji korelasi antara dua variabel)
3. Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0.05
4. Daerah kritis : H0 ditolak jika Sig <  $\alpha$
5. Dari hasil pengolahan dengan SPSS diperoleh *sign* = 0.000
6. Kesimpulan: Karena Sig (0.000) <  $\alpha$  (0.05), maka H0 ditolak. Dengan demikian, H1 diterima, menunjukkan adanya korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (Y) dan Pajak Kendaraan Bermotor (X1) dengan koefisien korelasi sebesar 0.966.

Prosedur pengujian hipotesis untuk korelasi variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) dan X2 (Bea Balik Nama) adalah

1. Hipotesis :  
 H0 = Tidak terdapat korelasi antara Y dan X2

- H1 = Terdapat korelasi antara Y dan X2
2. Statistik uji : Pearson
  3. Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0.05
  4. Daerah kritis : H0 ditolak jika  $\text{Sig} < \alpha$
  5. Dari hasil pengolahan dengan SPSS diperoleh  $\text{sign} = 0.000$
  6. Kesimpulan: Karena  $\text{Sig} (0.000) < \alpha (0.05)$ , maka H0 ditolak. Ini berarti H1 diterima, menunjukkan adanya korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (Y) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (X2) dengan koefisien korelasi sebesar 0.743.

Prosedur pengujian hipotesis untuk korelasi variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) dan X3 (Retribusi Daerah) adalah

1. Hipotesis :  
H0 = Tidak terdapat korelasi antara Y dan X2  
H1 = Terdapat korelasi antara Y dan X2
2. Statistik uji : Pearson
3. Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0.05
4. Daerah kritis : H0 ditolak jika nilai  $\text{Sig} < \alpha$
5. Dari hasil pengolahan dengan SPSS diperoleh  $\text{sign} = 0.000$
6. Kesimpulan: Karena  $\text{Sig} (0.000) < \alpha (0.05)$ , maka H0 ditolak. Oleh karena itu, H1 diterima, menunjukkan adanya korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (Y) dan Retribusi Daerah (X3) dengan koefisien korelasi sebesar 0.649

Dengan demikian, hasil pengujian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah) memiliki korelasi yang signifikan dengan Pendapatan Asli Daerah (Y) di Provinsi Jawa Barat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2023 pada Provinsi Jawa Barat” berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil :

1. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Pengaruh Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Bagi Dinas Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat, apabila dilihat dari Pengaruh Pajak Kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat yang cukup

berpengaruh signifikan, sebaiknya Dinas Pendapatan Asli Daerah lebih memaksimalkan mengenai pendataan ulang yang lebih lengkap terhadap objek pajak sehingga dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat. Pihak Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat memberikan peningkatan pelayanan publik demi meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya sehingga dapat menghindari wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya karena pelayanan yang kurang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=48dVDwAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id>
- Asteria, B. (2015). ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH. *Jurnal Riset Manajemen*, 2(1).  
<https://doi.org/10.32477/jrm.v2i1.101>
- Ayu, M., Syafitri, M., Fauziah, H., Fahrizi, F., & Syahril, M. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada UPTD Samsat Wilayah II Kalianda Lampung Selatan. *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai (JMMS)*, 6(2). <https://doi.org/10.24967/jmms.v6i2.1721>
- DDTCNews, R. (2020, September 17). *Duh, Jutaan Kendaraan di Jawa Barat Masih Tunggak Pajak*. DTTC News.  
<https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/24010/duh-jutaan-kendaraan-di-jawa-barat-masih-tunggak-pajak>
- Ferdian, T. (2022, Oktober 6). *Dermawan Pajak Bukan Sekadar Harapan*. DJP.  
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/dermawan-pajak-bukan-sekadar-harapan>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi*, 10(2). <http://ojs.stan-im.ac.id/index.php/JSMA/article/view/33/21>
- Nadeak, T., & Sunasti, E. (2019). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 973 /154 2018. *BUANA ILMU*, 4(1), 25–54. <https://doi.org/10.36805/bi.v4i1.809>

- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2018). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATU (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR ). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 5(2). <https://doi.org/10.33701/je%20&%20kp.v5i2.416>
- Nuraini. (2023, Juni 14). *Tidak Hanya Pajak, Ini Sumber Pendapatan Negara Indonesia*. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230614/259/1665166/tidak-hanya-pajak-ini-sumber-pendapatan-negara-indonesia#:~:text=Dari%20penjelasan%20di%20atas%2C%20kita,masih%20menjadi%20sumber%20pendapatan%20terbesar>
- Pandingan, M., & Hutapea, J. Y. (2024). Kontribusi PKB Dan BBNKB Bagi Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 7297–7306. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9966>
- Rompis, N. E., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA (STUDI KASUS PADA SAMSAT AIRMADIDI). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(03), 01–244.
- Ruliyani, V. (2022, September 28). *Pemerintah Provinsi Jawa Barat Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan di Jawa Barat*. BPK RI Perwakilan Jawa Barat. <https://jabar.bpk.go.id/pemerintah-provinsi-jawa-barat-adakan-program-pemutihan-pajak-kendaraan-di-jawa-barat/>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). PENGARUH RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2020.v09.i04.p06>
- Sugiyono. (2023, Juni 9). *Pengertian dan Contoh Metodologi Penelitian*. Deepublish store. <https://deepublishstore.com/blog/apa-itu-metodologi-penelitian/>
- Sungkawa, I. (2015). Penerapan Regresi Linier Ganda untuk Mengukur Efisiensi Pola Penggunaan Air Tanah System Rice Intensification (SRI) di Kabupaten Bandung, Subang, dan Karawang. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 6(2), 259. <https://doi.org/10.21512/comtech.v6i2.2270>
- Taufik, D. (2016, Januari 22). *Pajak Sumber Penerimaan Negara*. Bapenda Jabar. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/01/22/pajak-sumber-penerimaan-negara/>
- Taufik, D. (2022a, September 28). *2 Juta Lebih Wajib Pajak Manfaatkan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2022*. Bapenda Jabar.

<https://bapenda.jabarprov.go.id/2022/09/28/2-juta-lebih-wajib-pajak-manfaatkan-program-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-2022/>

Taufik, D. (2022b, Desember 27). *Gubernur Jawa Barat Apresiasi Bapenda Jabar Yang Berhasil Realisasikan Pendapatan Rp32 Triliun*. Bapenda Jabar. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2022/12/27/gubernur-jawa-barat-apresiasi-bapenda-jabar-yang-berhasil-realisasikan-pendapatan-rp32-triliun/>

Taufik, D. (2023, Agustus 15). *Pajak Kendaraan Bermotor Dominasi Target Pendapatan Jabar di Semester I 2023*. Bapenda Jabar. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2023/08/15/pajak-kendaraan-bermotor-dominasi-target-pendapatan-jabar-di-semester-i-2023/>

Tommy Pratama, H. T. R. (2022). *Implementasi Kebijakan Pembebasan/Penghapusan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Pekanbaru*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7080833>